

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kaderisasi merupakan hal penting bagi sebuah organisasi, karena merupakan inti dari kelanjutan perjuangan organisasi ke depan. Tanpa kaderisasi, rasanya sangat sulit dibayangkan sebuah organisasi dapat bergerak dan melakukan tugas-tugas keorganisasiannya dengan baik dan dinamis. Kaderisasi adalah sebuah keniscayaan mutlak membangun struktur kerja yang mandiri dan berkelanjutan. Kaderisasi ini sangat penting mengingat perlu adanya transfer pengetahuan (*knowledge*) politik, tidak hanya yang terkait dengan sejarah, misi, visi, dan strategi partai politik, tetapi juga hal-hal yang terkait dengan permasalahan bangsa dan Negara. Dalam kaderisasi juga dapat dilakukan transfer keterampilan dan keahlian berpolitik. Fungsi kaderisasi adalah mempersiapkan calon-calon (*embrio*) yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah organisasi. Kader suatu organisasi adalah orang yang telah dilatih dan dipersiapkan dengan berbagai keterampilan dan disiplin ilmu untuk bersaing memperebutkan jabatan-jabatan publik melalui mekanisme pemilu.

Pola kaderisasi perlu disertai dengan sistem transparan yang memberikan jaminan akses kepada semua kader yang memiliki potensi. Perlu juga dimunculkan sistem persaingan yang sehat dan transparan dalam tubuh organisasi partai politik. Kader dan calon pemimpin harus dibiasakan dengan sistem persaingan yang sehat dan transparan itu. Karena, dengan sistem persaingan yang terbebas dari kolusi dan

nepotisme inilah kaderisasi akan dapat melahirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas.

Pola kaderisasi partai politik di Indonesia masih didominasi oleh kalangan senior partai. Ini dapat dilihat dari pola kepemimpinan kepengurusannya, dimana mereka yang berusia di bawah 40 tahun berada dikepengurusan tingkat bawah (kab/kota dan kecamatan), sedangkan kepengurusan yang lebih tinggi (propinsi dan pusat) cenderung diisi oleh mereka yang berusia di atas 40 tahun. Hal ini jelas menunjukkan bahwa kaderisasi partai politik masih bersifat senioritas.

Dari survey yang telah dilakukan oleh Kemitraan Partnership di 3 daerah yaitu Jakarta, Yogyakarta, dan Aceh dan melibatkan 7 partai besar yang salah satunya adalah PDIP tentang Tata Kelola Organisasi Partai Politik, pola kaderisasi partai politik masih didominasi oleh kalangan senior partai. Survey tersebut dilakukan terhadap 1.369 responden yang terdiri dari:

Tabel 1.1
Rekap Responden dari Lembaga Survei
Kemitraan Partnership

Responden	Jumlah Responden
Pengurus Partai	770 orang
Konstituen	420 orang
Kelompok Strategis	179 orang

Sumber: Lembaga Survei Kemitraan Partnership 14 Mei 2009

Harian Suara Indonesia edisi 28 Oktober 2008 melansir bahwa sandungan terbesar bagi kalangan muda untuk berkarir di dunia politik adalah masih kentalnya sifat senioritas dalam partai politik. Senioritas masih mempengaruhi dalam penetapan daftar nama untuk anggota legislatif maupun eksekutif. Munculnya calon perseorangan dalam pemilu 2009 dapat dijadikan sebagai salah satu indikator masih kentalnya sifat senioritas dalam partai politik. Seperti kasus Rizal Mallarangeng, tidak adanya dukungan dari partai yang merupakan kendaraan utama untuk maju dalam pilpres membuatnya pesimis untuk terus maju. Adanya syarat ketentuan dukungan 20-25% yang diusulkan partai-partai besar di DPR menjadi sandungan besar untuk golongan muda maju dalam pemilihan capres.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pola kaderisasi yang digunakan PDI Perjuangan adalah sistem stelsel aktif, yaitu suatu sistem yang menerapkan bahwa setiap orang yang ingin menjadi kader partai harus aktif, implementasi sistem kaderisasi PDI Perjuangan adalah melalui empat proses yaitu: Penarikan (*rekrutmen*), Proses seleksi, Pendidikan politik, dan Pengembangan.

Penarikan (*rekrutmen*) di PDIP dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu:

1. Usulan dari struktur partai mulai dari yang paling bawah (*recruitment by bottom up demand*)
2. *Recruitment by merit sistem* yang melalui *scoring*.

Kedua pendekatan ini, digunakan secara bersamaan untuk mengukur akseptabilitas politik, juga kapabilitas maupun kompetensi caleg.

Kelompok-kelompok yang diprioritaskan untuk direkrut menjadi kader oleh PDIP dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.2
Kelompok-kelompok
Yang diprioritaskan untuk direkrut menjadi Kader PDIP

No.	Kelompok Prioritas	Persentase (%)
1	Buruh	23
2	Perempuan	21
3	Tani	15.5
4	Pemilih Pemula	13.4
5	Miskin Kota	7.3
6	Mahasiswa	7
7	Tokoh Agama	6.4
8	Profesional	0.8
9	Publik Figur/Selebritis	0.4
10	Nelayan	0.4

Sumber: Lembaga Survei Kemitraan Partnership 14 Mei 2009

Data LP3ES juga menunjukkan hal sama dimana 34,4% data yang diperoleh menunjukkan bahwa proses rekrutmen di strata bawah menjadi ujung tombak intensitas rekrutmen. Dari kedua data tersebut dapat kita lihat bahwa PDIP lebih menempatkan kelompok buruh dan perempuan sebagai kelompok yang paling

diprioritaskan untuk direkrut dibandingkan dengan kalangan selebritis/publik figur yang selama ini dianggap sebagai kelompok potensial untuk menjadi *vote getter*.

Fenomena masuknya kalangan artis/publik figur ke dalam dunia politik ini hanya merupakan salah satu cara yang dilakukan partai politik untuk merebut kantong-kantong suara dengan cara memanfaatkan massa dan popularitas yang dimilikinya. Masuknya kalangan artis ke dalam dunia politik sebenarnya sah-sah saja, mengingat konstitusi Negara kita menjamin bagi setiap warga Negara untuk menggunakan hak politiknya, apakah itu membentuk organisasi politik atau mencalonkan diri sebagai pejabat publik. Namun yang harus kita beri catatan adalah kekhawatiran munculnya fenomena *the wrong man in the wrong place*. Firmanzah dalam bukunya yang berjudul *Mengelola Partai Politik* (2008:137) menjelaskan bahwa:

Ada dua resiko dari rekrutmen di luar politik, yaitu:

1. Ketidaksesuaian paham ideologis antara orang yang direkrut dengan organisasi politik yang bersangkutan.
2. Terjebaknya suatu partai pada pragmatisme jangka pendek yang menjadikan organisasi politik sebagai kendaraan untuk berkuasa belaka.

Jadi apakah cara tersebut salah? Belum tentu cara tersebut salah. “Misalnya di Amerika Serikat, cara inipun dianut disana. Contohnya, Arnold Schwarzenegger yang memulai karier sebagai bintang film dan akhirnya menjadi gubernur di California, selanjutnya Ronald Reagan yang kini menjadi salah satu orang nomor satu di Negara adidaya tersebut. Tapi di Amerika, pilihan atas diri para bintang Hollywood tersebut tidak semata-mata didasarkan pada ketenaran mereka saja” (Firmanzah, 2008:137).

Langkah-langkah PDI Perjuangan untuk mengembangkan kader yang professional adalah sebagai berikut:

1. Memberikan beberapa persyaratan kepada para kader diantaranya adalah:
 - a. Persyaratan Obyektif kader meliputi: Pemahaman maksudnya ialah pemahaman siapa dan bagaimana kelompok sasaran, serta kemampuan berkomunikasi.
 - b. Persyaratan Subyektif kader meliputi: Kepribadian/ moral, idealisme dan komitmen, tingkat percaya diri, dan kondisi emosional.
2. Pembinaan kader dengan tujuan untuk terbentuknya kader-kader pelopor yang siap dan sanggup menjadi *top leaders* dengan bekal teori, mental dan watak progressif revolusioner sehingga benar-benar menjadi kader yang berkualitas dan professional. Bentuk pembinaannya berupa diskusi politik yang diadakan setiap 1 (satu) bulan sekali.

Namun pada kenyataannya kaderisasi yang berjalan di PDIP tidak berjalan dengan semestinya, ini terbukti dari banyaknya kader yang merasa kecewa atas keputusan-keputusan yang di tetapkan oleh partai. Untuk contoh seperti kasus yang terjadi di Medan, dimana Petisah dan Tembung yang merupakan kader DPD PDIP Medan yang dinilai telah memenuhi syarat bila dilihat dari segi proporsi kinerja kerja partai justru tidak terdaftar dalam daftar caleg untuk Daerah Pemilihan 2 Kota Medan. Ironisnya justru orang-orang yang berasal dari luar partai dan daerah pemilihan lainlah yang memperoleh nomor urut jadi. Ini merupakan salah satu kasus yang menggambarkan bahwa ada yang salah dalam mekanisme kaderisasi di PDIP.

Pada Pemilu 2009 lalu, terdapat sesuatu hal yang menarik dimana hampir semua daftar caleg PDIP disetiap daerah pemilihan ternyata yang bercokol di urutan 3 besar seragam. Urutannya adalah urutan 1 diduduki oleh fungsionaris partai, urutan kedua diduduki darah biru (orang yang memiliki hubungan keluarga/dekat dengan elite partai), dan urutan ketiga diduduki pemilik modal atau pengusaha. Apabila hal ini terus terjadi maka para kader yang tidak memiliki modal atau hubungan kekerabatan dengan elite partai akan terjegal karirnya.

Data dari *Infogue.com* menunjukkan bahwa faktor penghambat kaderisasi terutama bagi kalangan muda di PDIP adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Faktor Penghambat Kaderisasi di PDIP

Faktor Penghambat	Persentase (%)
Senioritas	28.4
Modal	25.5
Sistem Kaderisasi Yang Tidak Jelas	18.6
Tidak disukai Pimpinan	8.8

Sumber: diolah penulis dari *Infogue.com* 2009

Adanya sifat senioritas di dalam partai akan menimbulkan kesulitan untuk menerima kemunculan wajah-wajah baru yang mungkin memiliki potensi yang besar untuk menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang. Sifat senioritas yang menjadi salah satu penyebab mandegnya proses kaderisasi di dalam partai akan

menimbulkan kekecewaan terhadap para kadernya. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan membentuk partai-partai baru, seperti yang dilakukan oleh Roy B. B Janis yang kini mendirikan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP).

Untuk itu perlu dipikirkan langkah-langkah strategis untuk merubah keadaan itu. Langkah pertama dapat dimulai dengan melakukan perombakan mendasar dari sistem rekrutmen politik di dalam partai sehingga bisa mendukung terwujudnya sistem kaderisasi yang bersih. Keberhasilan partai politik dalam melakukan proses rekrutmen dan kaderisasi yang sehat dalam usaha menghasilkan kader-kader yang handal, akan menjaga proses demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik demi untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bertitik tolak dari penjelasan-penjelasan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dan penulisan, dengan judul “**POLA KADERISASI PARTAI POLITIK**”. Tulisan ini adalah sebuah studi kasus di DPD PDI Perjuangan Jawa barat.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada 3 masalah, yaitu:

1. Bagaimana pola rekrutmen partai politik di DPD PDI Perjuangan Jawa Barat.
2. Bagaimana pola kaderisasi partai politik di DPD PDI Perjuangan Jawa Barat.
3. Bagaimana proses distribusi kader partai di DPD PDI Perjuangan Jawa Barat.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka identifikasi masalah penulis jabarkan menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1.3.1 Mengenai rekrutmen partai politik di DPD PDIP Jawa Barat:

1. Apa yang menjadi kriteria orang/calon yang akan direkrut untuk menjadi anggota partai?
2. Sistem rekrutmen apa yang digunakan oleh PDI Perjuangan Jawa Barat dalam mencari bakal calon anggota?

1.3.2 Mengenai pola kaderisasi partai politik di DPD PDIP Jawa Barat:

1. Bagaimana kaderisasi yang dijalankan di PDI Perjuangan sendiri?
2. Hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam kaderisasi di PDI Perjuangan? Dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut?

1.3.3 Mengenai distribusi/pendayagunaan kader di DPD PDIP Jawa Barat:

1. Setelah proses kaderisasi dilaksanakan, bagaimana proses distribusi kader yang dilakukan oleh PDI Perjuangan?
2. Bagaimana mekanisme regenerasi/pergantian kepemimpinan di PDI Perjuangan?

1.4 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperluas pengetahuan kita serta memberikan gambaran nyata tentang partai politik di Indonesia.

Secara khusus tujuan dari penelitian dijabarkan ke dalam 3 hal, yaitu:

1. Memberikan gambaran tentang pola rekrutmen partai politik di DPD PDI Perjuangan Jawa Barat;

2. Memberikan gambaran tentang pola kaderisasi partai politik di DPD PDI Perjuangan Jawa Barat; dan
3. Memberikan gambaran tentang proses distribusi kader partai di DPD PDI Perjuangan Jawa Barat

1.5 Manfaat Penelitian

Secara teoritis, sebagai kontribusi dalam upaya turut berperan serta dalam upaya menumbuhkembangkan ilmu politi, khususnya tentang partai politik.

Secara praktis, penelitian ini ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya bagi penulis sendiri, serta bagi masyarakat luas pada umumnya tentang:

1. Pola rekrutmen partai politik di DPD PDI Perjuangan Jawa Barat.
2. Pola kaderisasi partai politik di DPD PDI Perjuangan Jawa Barat.
3. Proses distribusi kader partai di DPD PDI Perjuangan Jawa Barat.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi kasus dengan didukung metode penelitian kualitatif. Alasan dipilihnya metode studi kasus dalam penelitian ini karena metode studi kasus lebih memfokuskan penelitian pada satu masalah, dalam penelitian ini masalah yang diteliti adalah pola kaderisasi partai politik di PDI Perjuangan. Jika penelitian sudah terfokus pada satu masalah, diharapkan mampu mengungkapkan berbagai informasi lain yang dibutuhkan peneliti secara mendalam. Hal inilah yang menjadi alasan dasar peneliti memilih menggunakan metode studi kasus.

Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif. Alasan dipilihnya metode penelitian kualitatif karena dalam penelitian kualitatif peneliti dapat mengamati secara langsung, berinteraksi, dan berusaha memahami seberapa jauh pola kaderisasi partai politik di PDI Perjuangan. Penelitian kualitatif juga menuntut peneliti untuk turun langsung ke lapangan dalam waktu yang cukup lama, hal ini bertujuan agar peneliti mengetahui lebih dalam tentang masalah yang sedang diteliti.

1.7. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dan teknik pengumpulan data yang dipilih penulis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.7.1 Jenis Data

Jenis data yang dipilih oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder. Jenis data primer yang dipilih peneliti adalah Pengurus DPD PDIP Jawa Barat Bidang Kaderisasi, Kader PDIP, dan Anggota legislatif DPRD provinsi Jawa Barat, sedangkan jenis data sekunder yang dipilih peneliti adalah dokumen-dokumen yang berkaitan serta artikel dan berita-berita yang berkaitan dengan masalah yang sedang peneliti teliti.

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara peneliti langsung turun ke lapangan (lokasi penelitian), untuk melihat dan mendengar sumber data.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mendapatkan data yang diperoleh dari pihak-pihak yang kompeten mengenai masalah yang sedang diteliti. Dalam wawancara ini peneliti memilih pengurus partai bidang kaderisasi dan sejumlah kader partai serta anggota legislatif yang duduk di DPRD Provinsi Jawa Barat untuk dijadikan sumber data.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi digunakan peneliti dengan tujuan untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara sehingga akan diperoleh data yang akurat dapat dapat dipercaya. Dokumen dalam penelitian ini meliputi dokumen yang digunakan dalam penelitian ini tentunya dokumen yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti, seperti dokumen petunjuk pelaksanaan rekrutmen dan kaderisasi di PDI Perjuangan serta kurikulum yang memuat materi-materi kaderisasi dan agenda-agenda kegiatan kaderisasi di PDI Perjuangan. Selain dokumen-dokumen tersebut, penulis juga menggunakan beberapa artikel atau penelitian-penelitian lain yang membahas hal yang sama.

4. Studi Literatur

Studi literatur adalah membaca dan menelaah buku-buku atau berbagai sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti untuk pembahasan teoritis.

1.8 Lokasi dan Subjek Penelitian

Dalam hal ini terlebih dahulu perlu kita ketahui apa subjek penelitian itu. Nasution (1992:32) mengemukakan bahwa subjek penelitian adalah sumber penelitian yang dapat memberikan informasi, dipilih secara purposif dan bertalian dengan purpose atau tujuan tertentu. Dalam penelitian kualitatif subjek penelitiannya adalah pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi yang dipilih secara purposif dengan tujuan tertentu.

Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus partai bidang kaderisasi dan para kader partai itu sendiri (dalam hal ini PDI Perjuangan), sedangkan lokasi penelitian ini adalah di DPD PDI Perjuangan Jalan Pelajar Pejuang Kota Bandung.